



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029



PEMERINTAH KOTA KUPANG
Badan Keuangan dan Aset Daerah

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan bahwa penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang untuk periode 2025-2029 telah berhasil diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, diharapkan IKU ini dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan dalam mengoptimalkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, sesuai dengan visi pembangunan Kota Kupang. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan kontrol yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mengarahkan langkah strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang menuju pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan..

Kupang, 9 September 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang,



Jackson Jimmy Aryant Tunliu, SE., MM

Pembina

NIP. 19750405 200501 1 007

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan tujuan	2
BAB II TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	3
2.1. Tujuan dan Sasaran	4
2.2. Indikator Kinerja Utama	5
BAB III PENUTUP	6
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, seiring dengan diberlakukannya berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, upaya untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance* menjadi semakin penting dan mendesak.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) atau IKU, yang juga dikenal sebagai Indikator Kinerja Kunci, merupakan elemen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). IKU dirancang untuk mendukung pembangunan sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, IKU bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah—baik di tingkat kementerian, lembaga, unit eselon I, eselon II, maupun pemerintah daerah - yang memiliki otonomi dalam pengelolaan anggarannya, diwajibkan menyusun dokumen SAKIP. Salah satu dokumen kunci dalam SAKIP adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran strategis.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan transparan. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan berjalan efektif, efisien, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penerapan Indikator Kinerja Utama diharapkan mampu menyediakan informasi kinerja yang relevan dan diperlukan dalam mengelola manajemen kinerja yang baik. Selain itu, IKU berperan sebagai alat evaluasi dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis suatu organisasi, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan IKU menjadi kunci dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan reformasi birokrasi diseluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kota Kupang khususnya dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan tujuan dapat memperoleh gambaran untuk mengetahui tingkat capaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi instansi pemerintah yang menghasilkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adapun tujuan ditetapkannya Indilkator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang bertekad untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam upaya mencapai apa yang telah ditetapkan, ditetapkanlah Motto, Janji Layanan dan maklumat Pelayanan, antara lain:

✓ MOTTO

“ Kami Belum Sempurna Tapi Kami BISA.”

(Brilliant, Inovatif, Speed, Accountable)

✓ JANJI LAYANAN

“Pelayanan yang Efektif, Efisien, Tidak Diskriminatif, Transparan dan Akuntabel”

✓ MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah dan terjamin sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku dan siap menerima koreksi/sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangann yang berlaku.”

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dengan mengemban motto, janji layanan dan maklumat pelayanan tidak terlepas dari nilai-nilai suatu organisasi. Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran/kebaikan mengenai keyakinan dan perilaku organisasi yang paling dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, visi dan misi organisasi.

Nilai-nilai yang dianut oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan, yakni BerAKHLAK sebagai berikut:

❖ *Berorientasi Pelayanan*

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan. ASN juga diharapkan untuk terus melakukan perbaikan tanpa henti.

❖ *Akuntabel*

Melakukan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.

❖ *Kompeten*

Meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain dalam belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

❖ *Harmonis*

Menghargai setiap individu terlepas dari latar belakangnya, suka menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

❖ *Loyal*

Berkomitmen pada ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia kepada NKRI dan pemerintah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga kerahasiaan jabatan dan negara.

❖ *Adaptif*

Mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif.

❖ *Kolaboratif*

Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama demi menciptakan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.1. Tujuan dan Sasaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang memiliki tujuan strategis yang harus dicapai dalam jangka waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis yang relevan, analisis terhadap kinerja masa lalu, serta proyeksi kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang antara lain:

Tujuan

Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital.

Sasaran Strategis

- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah.
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis Digital.
- Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah.

Dengan menetapkan tujuan dan sasaran strategis ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan ini penting karena perencanaan kinerja tahunan dilakukan untuk periode tertentu, sehingga setiap tahunnya instansi wajib merencanakan program dan kegiatan berdasarkan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Peninjauan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang telah dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah. IKU ini kemudian ditetapkan sebagai pedoman resmi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran. Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dapat lebih optimal dan selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), diharapkan IKU dapat menjadi acuan utama dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. IKU ini juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan kontrak kerja atau perjanjian kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.

Melalui penerapan IKU, keberhasilan atau kekurangan dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dapat terukur secara objektif. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menunjukkan dan mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, IKU tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas kerja yang berorientasi pada hasil demi mewujudkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kupang, 9 September 2025
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang,



Jackson Jimmy Aryant Tunliu, SE., MM
Pembina
NIP. 19750405 200501 1 007

Paraf Hirierki	
Plt.Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	

LAMPIRAN

TUJUAN: Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang professional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital

**Stakeholders
Persepective**

Walikota
DPRD
BPK
Instansi Terkait
Masyarakat

Implementasi sistem informasi keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, melalui program peningkatan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan pengelolaan keuangan dan aset, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

**Costumers
Persepective**

SKPD
ASN
Masyarakat

Kepuasan Layanan yang Prima

Kepatuhan Layanan yang tinggi

**Internal Process
Persepective**

Perencanaan dan Perumusan
Kebijakan yang berkualitas

Pengelolaan Keuangan yang optimal

Pengendalian Mutu dan Penegakan
Hukum yang efektif

**Learning dan
Growth
Persepective**

SDM yang berkompeten

Organisasi yang adaftif

Teknologi Informasi Komunikasi
yang terintegrasi

Pelaksanaan Anggaran yang tepat
guna dan tepat ukuran

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi, sehingga laporan keuangan tidak selalu tepat waktu dan akurat.	Pengelolaan Aset Berbasis Keberlanjutan: Pendekatan ramah lingkungan dan berorientasi pembangunan jangka panjang.	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital		Implementasi sistem informasi keuangan berbasis elektronik untuk meningkatkan aksesibilitas dan akurasi laporan.	Mewajibkan penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.	Opini BPK	Penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Tidak Memberikan Opini (TMO).	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh BPK	LHP BPK
2	Masih ditemukan ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan dan standar akuntansi pemerintah.	Penekanan pada pelaporan real-time untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran.			Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal melalui pemanfaatan teknologi.	Penyusunan regulasi internal terkait mekanisme audit berbasis risiko.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Skor atau nilai yang mencerminkan tingkat kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan	Indeks yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.	Keputusan Menteri Dalam Negeri
3	Lemahnya mekanisme pengawasan internal, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan anggaran dan korupsi.	Pengelolaan Aset Berbasis Keberlanjutan: Pendekatan ramah lingkungan dan berorientasi pembangunan jangka panjang.			Pengembangan <i>dashboard</i> pelaporan keuangan <i>real-time</i> .	Peningkatan kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat untuk	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Pernyataan yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas, BI, dan OJK	Indeks yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, BI, dan OJK	Keputusan Kementerian PPN/Bappenas, BI, dan OJK
4	Inventarisasi aset daerah belum sepenuhnya akurat dan mutakhir karena minimnya pemanfaatan teknologi modern.	Kebutuhan akan profesionalisme tinggi dengan kemampuan teknologi digital terkini.			Digitalisasi inventarisasi aset daerah untuk meningkatkan akurasi dan	Mengembangkan aplikasi manajemen aset daerah berbasis <i>cloud</i> .	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Pernyataan yang diberikan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)	Indeks yang ditetapkan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)	Keputusan Satgas TP2DD
5	Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal.				Penyusunan rencana strategis pemanfaatan aset daerah berbasis kebutuhan pembangunan.	Mendorong kerja sama dengan pihak swasta dalam optimalisasi aset daerah melalui mekanisme BOT (<i>Build-Operate-Transfer</i>).	Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD	Persentase kontribusi nilai aset daerah (seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pemanfaatan atau pengelolaan aset tersebut	Pendapatan dari Aset daerah dibagi dengan Total PAD dikalikan 100%	LRA

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penerapan sistem lelang elektronik untuk aset tidak produktif.	Meningkatkan regulasi untuk mendukung percepatan pemanfaatan aset <i>idle</i> .	Skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Nilai atas kesesuaian nomenklatur program RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD dan kesesuaian pagu program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri
					Pelaksanaan pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan kompetensi.	Penyusunan roadmap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan aset.	Nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Nilai atas penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan, urusan kesehatan, urusan infrastruktur, dan untuk Standar Pelayanan Minimal	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri
					Pemberian insentif kepada aparatur yang memiliki sertifikasi profesional di	Mendorong kerja sama dengan lembaga pelatihan bersertifikasi	Indeks transparansi pengelolaan keuangan	Nilai atas ketepatan waktu dan keteraksesan dokumen pengelolaan keuangan daerah	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri
					Penyediaan platform <i>e-learning</i> untuk meningkatkan akses pelatihan.	Implementasi sistem penilaian kinerja berbasis indikator kompetensi.	Nilai penyerapan anggaran	Nilai atas penyerapan anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri
					Optimalisasi layanan berbasis <i>online</i> untuk mempermudah akses masyarakat.	Mengintegrasikan layanan publik ke dalam satu pintu melalui platform digital.	Nilai kondisi keuangan daerah	Nilai atas kondisi keuangan daerah meliputi kemandirian keuangan, fleksibilitas, dan solvabilitas	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri
				Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital.	Pengembangan mekanisme <i>feedback</i> masyarakat terhadap layanan publik di bidang keuangan dan aset.	Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan	Nilai aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai atas aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah meliputi pajak dan retribusi daerah serta belanja daerah	Kumulatif skor aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Satgas P2DD
					Peningkatan kapasitas <i>frontliner</i> dalam melayani masyarakat.	Penyediaan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk evaluasi layanan.	Nilai aspek realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai atas aspek realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah meliputi pajak dan retribusi daerah serta belanja daerah	Kumulatif skor aspek realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Satgas P2DD

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
							Nilai aspek lingkungan strategis elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai atas aspek realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah meliputi kanal pembayaran yang tersedia, edukasi/sosialisasi, dan jaringan	Kumulatif skor aspek lingkungan strategis elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Satgas P2DD
				Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah			Persentase aset tanah yang bersertifikat	Jumlah aset tanah yang bersertifikat dibagi dengan jumlah tanah yang dimiliki/dikalikan sertatus	Total aset tanah yang bersertifikat dibagi dengan total tanah yang dimiliki/dikuasi dikalikan 100%	Laporan BMD

INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2025 - 2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA	KET
1	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital	Opini BPK	Penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Tidak Memberikan Opini (TMO)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh BPK	LHP BPK	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Skor atau nilai yang mencerminkan tingkat kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan	Indeks yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.	Keputusan Menteri Dalam Negeri	
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Pernyataan yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas, BI, dan OJK	Indeks yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, BI, dan OJK	Keputusan Kementerian PPN/Bappenas, BI, dan OJK	
		Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Pernyataan yang diberikan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)	Indeks yang ditetapkan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)	Keputusan Satgas TP2DD	
		Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD	Persentase kontribusi nilai aset daerah (seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pemanfaatan atau pengelolaan aset tersebut	Pendapatan dari Aset daerah dibagi dengan Total PAD dikalikan 100%	LRA	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA	KET
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Nilai atas kesesuaian nomenklatur program RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD dan kesesuaian pagu program RKPD, KUA-PPAS dan APBD	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri	
		Nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Nilai atas penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan, urusan kesehatan, urusan infrastruktur, dan untuk Standar Pelayanan Minimal	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri	
		Indeks transparansi pengelolaan keuangan	Nilai atas ketepatan waktu dan keteraksesan dokumen pengelolaan keuangan daerah	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri	
		Nilai penyerapan anggaran	Nilai atas penyerapan anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri	
		Nilai kondisi keuangan daerah	Nilai atas kondisi keuangan daerah meliputi kemandirian keuangan, fleksibilitas, dan solvabilitas	Skor rata-rata dikalikan Bobot	Keputusan Menteri Dalam Negeri	
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital.	Nilai aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai atas aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah meliputi pajak dan retribusi	Kumulatif skor aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Satgas P2DD	
		Nilai aspek realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai atas aspek realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah	Kumulatif skor aspek realisasi elektronifikasi transaksi	Satgas P2DD	
		Nilai aspek lingkungan strategis elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai atas aspek realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah meliputi kanal pembayaran	Kumulatif skor aspek lingkungan strategis elektronifikasi transaksi	Satgas P2DD	
4	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah	Persentase aset tanah yang bersertifikat	Jumlah aset tanah yang bersertifikat dibagi dengan jumlah tanah yang dimiliki dikalikan sertatus	Total aset tanah yang bersertifikat dibagi dengan total tanah yang dimiliki/dikuasi dikalikan 100%	Laporan BMD	

UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala Badan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor
		Nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Nilai
		Indeks transparansi pengelolaan keuangan	Nilai
		Nilai penyerapan anggaran	Nilai
		Nilai kondisi keuangan daerah	Nilai
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digitall.	Nilai aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai
		Nilai aspek realisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai
		Nilai aspek lingkungan strategis elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Nilai
	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah	Persentase aset tanah yang bersertifikat	Persentase
Sekretaris	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digitall.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya dokumen umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen umum Perangkat Daerah	Dokumen
		Jumlah dokumen kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen
Perencana Ahli Muda (Koordinator Kasubag Perencanaan dan Keuangan)	Tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
		Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah	Dokumen
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan program anggaran dan pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen program anggaran dan pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen

UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Terlaksananya penyusunan kebutuhan barang inventaris Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang inventaris Perangkat Daerah	Dokumen
Bendahara	Terlaksananya pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Dokumen
Penata Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan tata kelola layanan teknis di Sekretariat BKAD	Jumlah laporan kegiatan tata kelola layanan teknis pada Sekretariat BKAD	Dokumen
Pengelola Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan pengelolaan layanan teknis di Sekretariat BKAD	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan layanan teknis pada Sekretariat BKAD	Laporan
Pengadministrasi Perkantoran	Terlaksananya dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>costumer service</i>) di Sekretariat	Jumlah laporan dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik	Dokumen
Operator Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan pengoperasian layanan teknis di Sekretariat BKAD	Jumlah laporan kegiatan pengoperasian layanan teknis pada Sekretariat BKAD	Dokumen
Pengelola Umum Operasional	Terlaksananya kegiatan pengelolaan layanan umum di Sekretariat BKAD	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan layanan umum pada Sekretariat BKAD	Dokumen
Kepala Bidang Anggaran	Meningkatnya tata kelola anggaran daerah	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persentase
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persentase
Kasubid Peny. Anggaran BTL dan Pembiayaan	Tersedianya dokumen anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan	Jumlah dokumen anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan	Dokumen
Analisis Penganggaran	Terlaksananya analisis penganggaran	Jumlah dokumen analisis penganggaran	Dokumen
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Terlaksananya analisis keuangan pusat dan daerah	Jumlah dokumen analisis keuangan pusat dan daerah	Dokumen
Kasubid Peny. Anggaran BL	Tersedianya dokumen anggaran belanja langsung	Jumlah dokumen anggaran belanja langsung	Dokumen
Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	Terlaksananya analisis sistem informasi pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen analisis informasi pelaksanaan anggaran	Dokumen
Pengadministrasi Anggaran	Terlaksananya kegiatan dukungan administrasi pada bidang anggaran BKAD Kota Kupang	Jumlah dokumen kegiatan dukungan administrasi pada bidang anggaran BKAD Kota Kupang	Dokumen

UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Penata Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang Anggaran Belanja Langsung BKAD	Jumlah laporan kegiatan tata kelola layanan teknis pada bidang Anggaran Belanja Langsung BKAD	Dokumen
Pengadministrasi Perkantoran	Terlaksananya dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>costumer service</i>) di bidang	Jumlah laporan dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik	Dokumen
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Koordinator Kasubid)	Tersedianya dokumen analisis keuangan pusat dan daerah (dokumen hibah dan bansos)	Jumlah dokumen analisis keuangan pusat dan daerah (dokumen hibah dan bansos)	Dokumen
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Tersedianya dokumen analisis keuangan pusat dan daerah	Jumlah dokumen analisis keuangan pusat dan daerah	Dokumen
Analisis Pelaksanaan Anggaran	Terlaksananya analisis pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen analisis pelaksanaan anggaran	Dokumen
Kepala Bidang Perbendaharaan	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan daerah	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persentase
		Persentase penurunan SiLPA	Persentase
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Koordinator Kasubid)	Tersedianya dokumen analisis keuangan pusat dan daerah (dokumen belanja tidak langsung daerah)	Jumlah dokumen analisis keuangan pusat dan daerah (dokumen belanja tidak langsung daerah)	Dokumen
Penata Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung BKAD	Jumlah laporan kegiatan tata kelola layanan teknis pada bidang Belanja Tidak Langsung Anggaran	Dokumen
Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan	Terlaksananya analisis pengelolaan sistem informasi perbendaharaan daerah	Jumlah dokumen analisis pengelolaan sistem informasi perbendaharaan daerah	Dokumen
Analisis Perbendaharaan	Terlaksananya analisis perbendaharaan daerah	Jumlah dokumen analisis perbendaharaan daerah	Dokumen
Kasubid BL	Tersedianya dokumen belanja langsung daerah	Jumlah dokumen belanja langsung daerah	Dokumen
Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan	Terlaksananya analisis pengelolaan sistem informasi perbendaharaan daerah	Jumlah dokumen analisis pengelolaan sistem informasi perbendaharaan daerah	Dokumen
Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan	Terlaksananya analisis pengelolaan sistem informasi perbendaharaan daerah	Jumlah dokumen analisis pengelolaan sistem informasi perbendaharaan daerah	Dokumen
Penata Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang Perbendaharaan Belanja Langsung BKAD	Jumlah laporan kegiatan tata kelola layanan teknis pada bidang Perbendaharaan Belanja Langsung	Dokumen
Operator Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang Perbendaharaan Belanja Langsung BKAD	Jumlah laporan kegiatan pengoperasian layanan teknis pada bidang Perbendaharaan Belanja	Dokumen

UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengadministrasi Perkantoran	Terlaksananya dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>costumer service</i>) di bidang	Jumlah laporan dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik	Dokumen
Kasubid Kas Umum Daerah	Tersedianya dokumen kas umum daerah	Jumlah dokumen kas umum dan daerah	Dokumen
Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Terlaksananya analisis pelaporan dan transaksi keuangan daerah	Jumlah dokumen analisis pelaporan dan transaksi keuangan daerah	Dokumen
Pengadministrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pengadministrasian keuangan daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen
Penata Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang Perbendaharaan Kas Umum dan Daerah BKAD	Jumlah laporan kegiatan tata kelola layanan teknis pada bidang Perbendaharaan Kas Umum dan	Dokumen
Pengadministrasi Perkantoran	Terlaksananya dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>costumer service</i>) di bidang	Jumlah laporan dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik	Dokumen
Kepala Bidang Akuntansi dan Aset	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persentase
Kasubid Pencatatan Aset	Tersedianya dokumen pencatatan aset	Jumlah dokumen pencatatan aset	Dokumen
Analisis Aset Daerah	Terlaksananya analisis aset daerah	Jumlah dokumen analisis aset daerah	Dokumen
Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Terlaksananya penilaian aset daerah	Jumlah dokumen penilai aset daerah	
Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan di bidang pencatatan aset	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan	Dokumen
Pengadministrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pengadministrasian keuangan daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen
Operator Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang Akuntansi dan Aset Pencatatan Aset BKAD	Jumlah laporan kegiatan pengoperasian layanan teknis pada bidang Akuntansi dan Aset Pencatatan	Dokumen
Pengadministrasi Perkantoran	Terlaksananya dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>costumer service</i>) di bidang	Jumlah laporan dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik	Dokumen
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Koordinator Kasubid Pemanfaatan)	Tersedianya dokumen analisis kebijakan (dokumen pemanfaatan aset daerah)		Dokumen

UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Analisis Klasifikasi Barang	Tersedianya analisis klasifikasi barang	Jumlah dokumen analisis klasifikasi barang	Dokumen
Kasubid Pelaporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Laporan
Analisis Laporan Keuangan	Terlaksananya analisis laporan keuangan	Jumlah laporan analisis laporan keuangan	Laporan
Penata Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan pengadministrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan	Laporan
Pengadministrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan pengadministrasian keuangan daerah	Jumlah dokumen administarsi keuangan	Laporan
Operator Layanan Operasional	Terlaksananya kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang Akuntansi dan Aset Pelaporan Kuangan BKAD	Jumlah laporan kegiatan pengoperasian layanan teknis pada Akuntansi dan Aset Pelaporan Kuangan	Dokumen
Pengadministarsi Perkantoran	Terlaksananya dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (<i>costumer service</i>) di bidang	Jumlah laporan dukungan kegiatan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik	Dokumen

Perspektif BSC	Inisiatif Strategis	Tujuan Inisiatif Strategis	Stakeholder
Keuangan	Implementasi Sistem Informasi Keuangan Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Meningkatkan pengelolaan keuangan dengan penggunaan teknologi informasi yang dapat memantau dan mengelola anggaran secara <i>real-time</i>	Pemerintah Daerah, BPK, Aparatur Keuangan
	Program Peningkatan Kepuasan Masyarakat dengan Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Mengukur dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Masyarakat, Pengelola Keuangan Daerah
	Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Meningkatkan Kontribusinya terhadap PAD	Mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi aset daerah yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD	Pemerintah Daerah, Bank Daerah, Instansi terkait
Proses Bisnis Internal	Penyempurnaan Proses Penyusunan Laporan Keuangan dan Penguatan Pengawasan Internal	Meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan audit BPK untuk mencapai opini WTP	BPK, Pengelola Keuangan, Auditor Internal
	Penyempurnaan Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Menurunkan jumlah pelanggaran melalui peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin pada pengelolaan keuangan dan aset	BPK, Pengelola Keuangan, Tim Pengawasan
	Implementasi Sistem Manajemen Aset Daerah Berbasis Teknologi untuk Peningkatan Akurasi dan Pembaruan Data Aset	Memastikan seluruh aset daerah terinventarisasi secara lengkap dan diperbarui secara berkala melalui sistem berbasis teknologi	Pengelola Aset Daerah, Sistem Informasi Keuangan

Perspektif BSC	Inisiatif Strategis	Tujuan Inisiatif Strategis	Stakeholder
Pelanggan (Masyarakat)	Penurunan Jumlah Keluhan yang Tidak terselesaikan Tepat Waktu	Menangani keluhan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan aset dengan efisien dan tepat waktu	Masyarakat, Tim Responsif, Pengelola Layanan
	Meningkatkan Responsivitas Terhadap Keluhan Masyarakat melalui Sistem Pengaduan Online dan Tim Tanggap Cepat	Menyelesaikan keluhan masyarakat dengan efisien melalui sistem pengaduan yang mudah diakses dan tim yang responsif	Masyarakat, Tim Tanggap Cepat, Pengelola Layanan
	Penyempurnaan Layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Feedback Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkenalkan platform digital untuk transparansi dan kemudahan akses layanan pengelolaan keuangan dan aset	Masyarakat, Pengelola Layanan, Teknologi Informasi
Pembelajaran dan Pertumbuhan	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan dan Sertifikasi di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset melalui pelatihan dan sertifikasi berkala	Aparatur Pemerintah Daerah, Lembaga Sertifikasi
	Pengembangan Skema Pemanfaatan Aset Idle untuk Aktivitas Produktif melalui Kolaborasi dengan Pihak Ketiga	Meningkatkan kontribusi aset <i>idle</i> dengan memanfaatkannya dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau manfaat lainnya	Pemerintah Daerah, Pengusaha Swasta, Lembaga Keuangan

Perspektif BSC	Inisiatif Strategis	Tujuan Inisiatif Strategis	Stakeholder
	Program Sertifikasi Profesional bagi Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset melalui sertifikasi profesional	Aparatur Pemerintah Daerah, Lembaga Sertifikasi, Kementerian Keuangan